



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRISNO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 801725

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.015.015.000**

1. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.860.000
2. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/99 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 275.238.000
4. Tanah Seluas 1450 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.367.000
5. Tanah Seluas 805 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 8.050.000
6. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/120 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 3127 m2/210 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 226.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



3. MOBIL, ISUZU TBR 54F TURBO LS Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.930.000
---------------------------	-----	------------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
-------------------	-----	------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.090.000
-----------------------	-----	-----------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
------------------	-----	------

Sub Total	Rp.	2.296.035.000
-----------	-----	---------------

III. HUTANG	Rp.	76.425.188
-------------	-----	------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.219.609.812
-----------------------------------	-----	---------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.